

Nadia Eva Prasanti

2216041130

**ANALISIS PENGARUH RESPON MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN KAMPUS
(Studi Kasus Jalan Alternatif Gang Teknik, Universitas Lampung)**

**BAB II
TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Landasan Teori

Respon, dalam pengertian kamus besar bahasa Indonesia, merujuk pada respons, reaksi, dan jawaban terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Dalam konteks politik, Marbun menjelaskan bahwa respon adalah bentuk tanggapan, reaksi, dan jawaban terhadap suatu tindakan atau peristiwa. Respon ini merupakan hasil dari interaksi antara berbagai faktor eksternal seperti objek dan orang-orang, serta faktor internal seperti sikap, pengalaman masa lalu, dan emosi. Menurut Djalaludin Rakhmat dalam (Maknolia & Hidayat, 2020) konsep respon mencakup segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisme sebagai tanggapan terhadap rangsangan atau perangsang. Penting untuk dicatat bahwa respon ini tidak selalu berarti gerakan positif, melainkan mencakup berbagai jenis aktivitas yang dipicu oleh rangsangan tertentu. Secara umum, respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang diperoleh dari pengamatan suatu subjek, peristiwa, atau hubungan-hubungannya. Informasi ini diperoleh melalui proses pengamatan, penyimpulan, dan interpretasi pesan-pesan yang. Dalam pemahaman Djalaludin Rakhmat, respon tidak terbatas pada tindakan fisik atau gerakan positif saja. Ia mencakup beragam jenis aktivitas yang muncul sebagai tanggapan terhadap stimulus atau perangsang, yang kemudian membentuk pemahaman atau kesan yang lebih dalam tentang subjek atau situasi yang diamati. Sebagai contoh, respon bisa berupa reaksi fisik, respons emosional, atau bahkan proses pemikiran dan penilaian yang kompleks. Dalam konteks ini, respon adalah cara organisme berinteraksi dengan lingkungannya dan menghasilkan pemahaman tentang apa yang terjadi di sekitarnya.

Kebijakan berasal dari kata *policy* dalam bahasa Inggris dan memiliki akar etimologi dari kata Yunani "polis" yang berarti kota, dapat dijelaskan sebagai suatu gagasan formal untuk mengatur organisasi yang diterima secara bersama-sama oleh pemerintah atau lembaga. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara lebih rinci Ramdhani dalam (MY & Anggraini, 2021) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian rencana, program, aktivitas, keputusan, dan sikap yang diambil oleh berbagai pihak sebagai langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kebijakan ini dapat berasal dari individu atau kelompok yang merancang sejumlah program, aktivitas, atau tindakan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, kebijakan tersebut akan diterapkan dan dilaksanakan oleh pihak terkait untuk mengatasi masalah spesifik yang dihadapi. Penting untuk dicatat bahwa penetapan kebijakan adalah faktor yang sangat krusial dalam upaya mencapai tujuan sebuah organisasi. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman formal yang membantu dalam mengatur berbagai aspek organisasi dan membantu dalam memecahkan permasalahan yang muncul.

Dalam konteks kampus, pengertian kebijakan mengacu pada aturan atau pedoman yang dibuat oleh pihak kampus untuk mengatur berbagai aspek kehidupan dan aktivitas di lingkungan kampus (Rochana & at.al, 2021). Kebijakan kampus ini adalah seperangkat rencana dan keputusan formal yang disepakati oleh pihak-pihak yang berwenang di universitas atau institusi pendidikan. Tujuan dari kebijakan kampus adalah untuk mencapai berbagai tujuan tertentu, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga tata tertib kampus, atau mengatur penggunaan fasilitas kampus. Kebijakan kampus dapat berupa berbagai hal, seperti kebijakan akademik yang mengatur kurikulum, penilaian, atau kebijakan penerimaan mahasiswa. Selain itu, terdapat juga kebijakan terkait etika dan kode perilaku di lingkungan kampus, serta kebijakan terkait fasilitas dan pengelolaan sumber daya kampus (Ningrum & at.al, 2018).

Dasar perilaku organisasi menjadi relevan dalam memahami respon mahasiswa terhadap kebijakan penutupan jalan alternatif oleh pihak kampus. Robbins (2006) yang dikutip oleh (Widyanti, 2019) mendefinisikan perilaku organisasi sebagai bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan keefektifan organisasi. Dalam hal ini, individu (mahasiswa), kelompok (mahasiswa sebagai komunitas akademik), dan organisasi formal

(kampus) berinteraksi dalam konteks kebijakan kampus. Konsep ini menjadi landasan teoretis yang relevan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi respon mahasiswa terhadap kebijakan penutupan jalan alternatif, yang selanjutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika perilaku organisasi di lingkungan kampus yang spesifik.

Menurut (Pasolong, 2023) Pengambilan keputusan adalah tahapan krusial dalam manajemen dan proses pembuatan keputusan yang memerlukan analisis dan pertimbangan yang cermat. Sebagaimana didefinisikan, ini adalah proses sistematis dalam memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang ada, baik untuk mencapai tujuan tertentu maupun sebagai langkah pemecahan masalah. Sehingga dalam permasalahan ini teori evaluasi masih relevan.

Dalam (Hajaroh, 2018) peran teori evaluasi, terutama dalam cabangnya yang berkaitan dengan "penggunaan," memiliki peran penting dalam konteks pengambilan keputusan terkait kebijakan alternatif yang ada, terutama dalam lingkup pendidikan tinggi di mana respon mahasiswa memegang peran kunci. Dalam proses evaluasi ini, informasi yang diperoleh dari respon mahasiswa terhadap kebijakan menjadi bagian integral dari data yang dianalisis. Teori evaluasi memandang bahwa pengambilan keputusan kebijakan yang efektif harus didasarkan pada bukti empiris dan pemahaman yang sistematis tentang dampak kebijakan tersebut. Dengan mempertimbangkan respon mahasiswa sebagai salah satu bentuk bukti empiris, pengambilan keputusan mengenai keberlanjutan kebijakan alternatif dapat dipandu oleh informasi yang relevan ini. Hal tersebut memungkinkan pihak kampus untuk memilih alternatif kebijakan yang paling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk mahasiswa. Dengan demikian, teori evaluasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan alternatif yang diambil didasarkan pada pemahaman yang kuat dan relevan tentang bagaimana respon mahasiswa memengaruhi kebijakan tersebut dan apakah kebijakan tersebut layak dipertahankan atau diperbaiki. Dalam konteks ini, teori evaluasi membantu dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan tinggi berorientasi pada bukti dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh komunitas kampus.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik ini telah dilakukan oleh peneliti lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Setiono & at.al, 2021) penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan fokus pada evaluasi pengaruh positif respons mahasiswa terhadap kebijakan pembelajaran daring di Prodi PGSD FKIP Universitas Bengkulu. Lebih khusus, penelitian tersebut mengeksplorasi bagaimana respons positif dari mahasiswa, yang mencakup kemampuan belajar mandiri dan keterampilan berinteraksi dengan teknologi dalam konteks pembelajaran daring dapat mendukung kelangsungan dan keberhasilan implementasi pembelajaran daring di Prodi PGSD FKIP Universitas Bengkulu. Penelitian ini juga mencari pemahaman lebih lanjut tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada respons positif mahasiswa terhadap kebijakan ini dan bagaimana respons tersebut dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan perubahan kebijakan di masa depan. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana respons mahasiswa dapat memengaruhi implementasi kebijakan di lingkungan perguruan tinggi. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa respons positif mahasiswa terhadap kebijakan dapat mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Naniopoulos & at.al, 2017) menghasilkan perlunya merancang ulang ruang terbuka di kampus Universitas Aristoteles Thessaloniki, termasuk mengubah penggunaan ruang parkir yang sudah ada, memastikan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, dan membebaskan ruang terbuka untuk keperluan pelajar, karyawan, pejalan kaki, dan pengendara sepeda. Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan zona *woonerf* sebagai solusi potensial untuk menciptakan ruang terbuka yang lebih aman dan ramah lingkungan di kampus. Penelitian ini berfokus pada pentingnya restrukturisasi ruang terbuka, termasuk pengalihan fungsi ruang parkir yang telah ada, untuk memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta membebaskan ruang tersebut agar dapat digunakan oleh berbagai pihak, termasuk mahasiswa, karyawan, pejalan kaki, dan pengendara sepeda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa respon mahasiswa bukan hanya sekadar reaksi subjektif, tetapi juga dapat memengaruhi kebijakan kampus secara lebih luas. Mahasiswa, sebagai bagian integral dari komunitas kampus, memiliki potensi untuk memengaruhi proses

pengambilan keputusan atau perubahan kebijakan jika respons mereka terhadap perubahan tersebut dapat diorganisir dengan baik. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya memahami dan mengelola respons mahasiswa terhadap perubahan kebijakan kampus dalam upaya untuk mencapai hasil yang lebih positif atau mengarah pada kebijakan yang lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.

3. Penelitian (Aji & Puspitasari, 2022) yang berfokus pada respons masyarakat terhadap kebijakan publik dan menyoroti pentingnya kejelasan serta manfaat praktis dalam mendapatkan dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat. Penelitian ini menghasilkan respon masyarakat terhadap kebijakan cenderung positif jika ada kejelasan dan manfaat praktis yang jelas dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang disertai dengan informasi yang jelas dan dapat memberikan manfaat yang konkret kepada masyarakat cenderung lebih berhasil dalam mendapatkan dukungan dan kepatuhan dari masyarakat. Selain itu, proses evaluasi dan perbaikan kebijakan juga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Jadi, kejelasan dan manfaat praktis adalah faktor-faktor kunci yang dapat memengaruhi respons positif masyarakat terhadap kebijakan publik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang jelas dan memberikan manfaat yang konkret kepada masyarakat cenderung lebih berhasil dalam mendapatkan dukungan dan kepatuhan. Ini mengarah pada pemahaman bahwa ketika perubahan kebijakan di kampus disertai dengan informasi yang jelas tentang tujuannya dan manfaat praktis yang akan diperoleh oleh mahasiswa, maka kemungkinan besar respon mahasiswa akan lebih positif. Sehingga betapa pentingnya mengkomunikasikan perubahan kebijakan dengan jelas kepada mahasiswa dan menyoroti manfaat praktis yang dapat mereka nikmati dari perubahan kebijakan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh (INDRIANI, 2018) berfokus pada kompleksitas respons masyarakat terhadap kebijakan publik. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang memengaruhi respons masyarakat terhadap kebijakan, termasuk ketidakpatuhan hukum, pandangan masyarakat yang kurang positif terhadap kebijakan, dominasi kepentingan tertentu, ketidakpastian hukum, dan tantangan mengubah kebiasaan masyarakat. Studi ini menyoroti pentingnya memahami dinamika di balik respons masyarakat terhadap kebijakan dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi. Hasil penelitian tersebut juga menekankan pentingnya memahami peran

kelompok-kelompok kepentingan dalam membentuk respon masyarakat terhadap kebijakan. Selain itu, kesadaran akan ketidakpatuhan hukum dan peran pandangan masyarakat dalam implementasi kebijakan menunjukkan bahwa komunikasi efektif dan edukasi kepada masyarakat memainkan peran kunci dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian, studi literatur ini memberikan wawasan yang relevan dalam konteks respons masyarakat terhadap kebijakan dan dapat menjadi dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk memahami dan meningkatkan dukungan serta kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, termasuk dalam konteks penelitian yang fokus pada respon mahasiswa terhadap perubahan kebijakan di kampus.

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Ni'mah, 2016) Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa jenis kebijakan yang melibatkan penutupan akses jalan di sekitar sekolah dapat menghasilkan respons yang beragam dari masyarakat. Masyarakat yang setuju dengan kebijakan tersebut melihatnya sebagai langkah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan tertib bagi peserta didik. Di sisi lain, masyarakat yang tidak setuju mungkin merasa terganggu karena perubahan yang memengaruhi rutinitas mereka. Penelitian tersebut memahami bagaimana kebijakan penutupan akses jalan di sekitar sekolah memengaruhi interaksi antara pihak sekolah dan masyarakat. Penelitian tersebut juga berusaha untuk menganalisis respons yang beragam dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut, dengan memperhatikan perspektif yang setuju dan tidak setuju. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam konteks implementasi kebijakan tersebut, dan bagaimana hal tersebut dapat menjadi strategi efektif untuk mengelola konflik dan perbedaan pandangan. Dengan demikian, fokus penelitian tersebut adalah pada interaksi antara kebijakan penutupan jalan sekolah dan respons serta interaksi masyarakat yang terlibat.

Studi literatur yang telah disebutkan menggambarkan berbagai penelitian terkait dengan respons masyarakat atau mahasiswa terhadap kebijakan, baik dalam konteks pendidikan maupun implementasi kebijakan publik. Hasil dari studi literatur ini menyajikan beragam temuan yang memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian yang berfokus pada respon mahasiswa terhadap perubahan kebijakan kampus. Terdapat beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil dari studi literatur ini:

1. Respons positif dari mahasiswa terhadap kebijakan dapat memiliki dampak positif pada efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan. Respons mahasiswa yang mencakup kemampuan belajar mandiri dan keterampilan berinteraksi dengan teknologi dalam konteks pembelajaran daring dapat mendukung kelangsungan dan keberhasilan implementasi pembelajaran daring di lingkungan perguruan tinggi.
2. Penutupan akses jalan di sekitar sekolah, seperti yang terjadi dalam beberapa penelitian, dapat menghasilkan respons yang beragam dari masyarakat. Namun, pentingnya komunikasi, musyawarah, dan pemahaman yang baik antara pihak sekolah atau kampus dengan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengelola konflik dan perbedaan pandangan terkait kebijakan tersebut.
3. Kejelasan dan manfaat praktis dari kebijakan dapat memengaruhi respons positif masyarakat. Kebijakan yang disertai dengan informasi yang jelas dan manfaat konkret bagi masyarakat cenderung lebih berhasil dalam mendapatkan dukungan dan kepatuhan. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif kepada mahasiswa tentang tujuan dan manfaat praktis dari perubahan kebijakan kampus dapat meningkatkan respon positif mereka.
4. Menekankan kompleksitas respons masyarakat terhadap kebijakan publik dan pentingnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi respons tersebut. Ketidakpatuhan hukum, pandangan masyarakat yang beragam, dominasi kepentingan tertentu, ketidakpastian hukum, dan tantangan mengubah kebiasaan masyarakat adalah beberapa faktor yang mempengaruhi respons masyarakat terhadap kebijakan.

Dengan demikian, penelitian selanjutnya yang berfokus pada respons mahasiswa terhadap perubahan kebijakan di lingkungan kampus mengambil pelajaran dari studi literatur tersebut. Dengan memahami bahwa respon mahasiswa bukan hanya reaksi subjektif, tetapi juga dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan atau perubahan kebijakan jika diorganisir dengan baik. Komunikasi yang jelas, pemahaman manfaat praktis, dan musyawarah antara pihak kampus dan mahasiswa dapat menjadi strategi penting dalam memastikan respons yang lebih positif terhadap perubahan kebijakan di kampus.

Daftar Pustaka

- Aji, A. W., & Puspitasari, M. (2022). Penerimaan Masyarakat atas Kebijakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 104-113.
- Hajaroh, M. (2018). Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *Foundasia*, 9(1).
- INDRIANI, E. (2018). Faktor-faktor yang Menentukan Implementasi Kebijakan Publik Studi Kasus Fasilitas Pejalan Kaki di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Maknolia, Y., & Hidayat, D. (2020). Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covid-19 Di Kota Bandung. *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2).
- MY, A. S., & Anggraini, D. (2021). Analisis Dampak Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka terhadap Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Sahid. *Management and Accounting Expose*, 4(2), 4.
- Naniopoulos, A., & at.al. (2017). The concept of woonerf zone applied in university campuses: the case of the campus of the Aristotle University of Thessaloniki. *Transportation Research Procedia*, 450-458.
- Ni'mah, C. (2016). Resolusi konflik kebijakan kepala sekolah studi kasus di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Ningrum, N. M., & at.al. (2018). Implementasi Kebijakan Rektor tentang Tata Krama dan Etika Mahasiswa di UKM/Ormawa Universitas Negeri Padang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(1), 12-18.
- Pasolong, H. (2023). Teori Pengambilan Keputusan. Bandung: ALFABETA.
- Rochana, R., & at.al. (2021). Pengaruh implementasi kebijakan kampus merdeka terhadap minat dan keterlibatan mahasiswa. *Journal of Business Management Education (JBME)*, 6(3), 11-21.
- Setiono, P., & at.al. (2021). Analisis respon mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran daring. *Jurnal Education and Development*, 19-23.
- Widyanti, R. (2019). Perilaku Organisasi: Teori dan Konsep.